

# Potensi Konflik dan Pola Penguasaan Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan di Sumatera Selatan

DIDI TAHYUDIN

FKIP Universitas Sriwijaya, Program Doktor Universitas Sriwijaya  
email: tahyudind@yahoo.com

**Abstract.** The occupation and cultivation of Wildlife Area (SM) Bentayan into rubber and oil palm plantations continued by the community, even to this day. As a result, habitat conditions no longer possible for the lives of animals specially protected. This study will describe the pattern of the occupation of SM Bentayan by society, including the history of its arrival. The method used is qualitative, the main instrument are the interview and observation. The results showed that the people coming to SM Bentayan are the history of displacement due to economic constraints in the area of origin. While in the SM Bentayan there is a "chance" for people to occupy it, due to the lack of supervision of the authorities. Economic demands and the lack of supervision in the SM Bentayan, became the basis of society, and then hang the coming gradually. The occupation looks quite systematic and specific mechanisms. The occupation ultimately lead to conflict between communities and government.

*Keyword:* occupation, Bentayan, Wildlife Area, konflik

**Abstrak.** Penguasaan dan penggarapan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bentayan menjadi kebun karet dan kelapa sawit terus berlangsung oleh masyarakat, bahkan hingga saat ini. Akibatnya kondisi habitatnya tidak memungkinkan lagi bagi kehidupan hewan-hewan khusus yang dilindungi. Penelitian ini akan menjabarkan pola penguasaan wilayah SM Bentayan oleh masyarakat, termasuk sejarah kedatangannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan instrumen utama adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan masyarakat ke SM Bentayan merupakan sejarah perpindahan masyarakat dikarenakan keterbatasan ekonomi di daerah asal. Sementara di kawasan SM Bentayan terdapat "peluang" bagi masyarakat untuk menempatnya, dikarenakan minimnya pengawasan dari aparat. Tuntutan kebutuhan ekonomi dan minimnya pengawasan di kawasan SM Bentayan, menjadi dasar datangnya masyarakat serta kemudian menguasainya secara berangsur-angsur. Pola penguasaan terlihat cukup sistematis dan memiliki mekanisme tertentu. Penguasaan lahan pada akhirnya juga memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

*Kata kunci:* penguasaan, Bentayan, Suaka Margasatwa, konflik

## Pendahuluan

Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bentayan adalah satu dari enam kawasan SM yang ada di Sumatera Selatan. Menurut data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Sumsel, luasnya mencapai 38.000 Ha. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keutuhan berbagai jenis satwa dan tanaman yang dikhawatirkan akan punah. Oleh karena itu, kawasan SM, termasuk SM Bentayan pada dasarnya harus terbebas dari aktivitas manusia.

Hasil observasi di lokasi SM Bentayan dan wawancara penulis dengan pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sumatera Selatan, semua kawasan SM sudah dirambah dan dikuasai masyarakat

menjadi areal perkebunan karet, kelapa sawit, kopi, dan kebun campuran sehingga kondisi habitatnya tidak kondusif lagi bagi kehidupan satwa yang ada. Satwanya juga menjadi obyek perburuan masyarakat baik untuk sumber konsumsi dan juga diperdagangkan. Akibatnya, beberapa hewan khas di kawasan ini menjadi langka, bahkan banyak yang sudah tidak ditemukan lagi.

Kawasan SM Bentayan sendiri adalah salah satu kawasan yang paling banyak dirambah oleh masyarakat dan setiap tahun terus bertambah. Kondisi SM Bentayan sekarang sudah berupa semak belukar, kebun kelapa sawit, dan kebun karet masyarakat. Selain itu, di dalam kawasan ini terdapat 3 (tiga) dusun lengkap dengan sarana dan



prasarana pemukimannya seperti Sekolah Dasar, SMP, masjid, pura, tempat pelayanan kesehatan masyarakat dan kantor kepala dusun serta balai pertemuan.

Di dusun Belido 1 dan Belido 2, yang merupakan kawasan SM Bentayan, saat ini sudah terdapat sebanyak 983 jiwa atau 202 kepala keluarga (KK) yang secara administratif dusun ini termasuk wilayah Desa Simpang Tungkal. Sementara, Dusun Belido 3 atau Dusun Suka Makmur penduduknya berjumlah 660 jiwa, terdiri dari laki-laki 329 jiwa dan perempuan 331 jiwa dengan jumlah 180 kepala keluarga.

Dusun Belido 3 merupakan bagian dari wilayah Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Penduduk yang ada di kawasan SM Bentayan ini pada umumnya lebih kurang 70% adalah penduduk kelompok Etnis Jawa dan Bali, 30% penduduk lokal dari beberapa kelompok Etnis yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Penduduk mendiami kawasan ini, sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sejak sekitar tahun 1989 silam, namun saat itu kedatangan warga hanya sekedar mencari kayu dan mencari hewan buruan saja. Kedatangan dalam jumlah banyak dan kemudian langsung membuka pemukiman dengan mengkapling-kapling tanah, terjadi sejak 2003. Sejak tahun 2004 hingga 2007, aparat dari pihak BKSDA Sumsel, cukup sering mendatangi warga, baik dalam bentuk razia, pelarangan, dan bahkan sampai menangkap warga yang dianggap melanggar fungsi kawasan SM Bentayan.

Konflik antara pihak BKSDA dan warga setempat terus terjadi, hingga tahun 2007 dicapai kesepakatan melalui pola mediasi. Tiga opsi disepakati saat itu yaitu, *inclave* (mengeluarkan lahan yang sudah terlanjur digarap dari status SM), ganti rugi, dan pindah lokasi baru. Hanya saja sampai saat ini, ketiga opsi tersebut tidak pernah dilaksanakan. Akibatnya masyarakat tetap bertahan di lokasi dan bahkan semakin lama semakin banyak masyarakat masuk dan menggarap kawasan SM. Bentayan (Schale up, 2011).

Sesuai amanat perundang-undangan, kawasan SM Bentayan tetaplah sebagai sebuah kawasan SM, yang seharusnya terbebas dari campur tangan manusia. Disinilah persoalan menjadi rumit, karena realitasnya masyarakat semakin lama semakin banyak dan semakin kuat posisinya. Penyelesaian konflik semakin lama juga akan semakin

sulit, karena masyarakat semakin kompleks. Oleh karenanya, untuk bisa menemukan solusi terbaik, perlu diuraikan terlebih dahulu kondisi awal dan kondisi sekarang masyarakat di daerah tersebut. Hal itu akan menjadi dasar dalam melihat persoalan lebih jauh dan kemudian mencari solusi yang terbaik.

Dalam tulisan ini ada empat permasalahan yang akan dijelaskan *Pertama*, bagaimana proses kedatangan penduduk yang berada di kawasan SM Bentayan. *Kedua*, mengapa penduduk masuk ke kawasan SM Bentayan, *Ketiga*, bagaimana penduduk melakukan penguasaan di SM Bentayan dan *Keempat*, potensi konflik yang terjadi pada kawasan SM Bentayan. Dengan memahami empat persoalan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan konflik penguasaan dan penggarapan kawasan SM Bentayan yang terus bertambah luas setiap tahunnya.

Agar bisa memahami empat permasalahan pokok di atas, digunakan paradigma konstruktif dengan pendekatan kualitatif agar bisa terlihat bagaimana mereka melihat dan mengartikan kondisi lingkungan alam yang ada di sekitarnya, faktor-faktor apa yang paling berpengaruh serta bagaimana perilakunya.

Wawancara secara mendalam telah dilakukan dengan 40 orang anggota dan tokoh masyarakat yang berada di dalam kawasan SM Bentayan mulai dari daerah Belido 1,2, dan 3, serta dusun-dusun yang berada di wilayah Desa Bentayan, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan para petugas BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang bertugas menjaga dan mengelola kawasan tersebut. Observasi di lingkungan pemukiman dan kebun-kebun tempat mereka bekerja telah dilakukan untuk mengetahui dari dekat kondisi kehidupan mereka di dalam kawasan SM Bentayan.

### **Konflik Struktural dan Sosiologi Kritis**

Melihat persoalan penguasaan SDA ,khususnya penguasaan kawasan SM oleh masyarakat yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik dengan pemerintah, akan dimulai dari sudut pandang konflik struktural. Hal ini terkait dengan posisi masyarakat sebagai bagian integral dari sebuah negara. Masyarakat sebagai warga negara kemudian terlibat konflik dengan negara itu sendiri. Konflik ini disebabkan karena masyarakat



menempati kawasan yang menurut negara terlarang.

Pembahasan mengenai ini tidak terlepas dari sudut pandang Karl Marx, sebagai penggagas teori konflik struktural, yang mengatakan bahwa konflik sejatinya adalah persoalan struktur.

Para teoretisi konflik Marxian memandang konflik sosial muncul terutama karena adanya upaya untuk memperoleh akses kepada kondisi-kondisi material yang menopang kehidupan sosial. Para teoretis ini melihat kedua fenomena ini sebagai determinan krusial bagi pola-pola sosial dasar suatu masyarakat (Sanderson dalam Nazir, 1998;11).

Stephen K Sanderson (Nazir, 1998: 12) mengatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya, konflik menurut kelompok neo Marxis memiliki beberapa strategi penting yaitu, (1) kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan; (2) sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik merupakan hal penting, sehingga berbagai kelompok berusaha merebutnya, (3) akibat tipikal dari pertentangan ini, pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang ter subordinasi; (4) pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan, (5) konflik dan pertentangan sosial melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial, (6) perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi, karena konflik dan pertentangan selalu ada dalam kehidupan sosial.

Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam kegiatan produksi. Evolusi kehidupan sosial manusia pada akhirnya akan mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Masyarakat bisa jadi akan terpecah menjadi kelas-kelas sosial berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan produksi. Kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang ter subordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi.

Gagasan mengenai konflik struktural

ini akan menjadi sudut pandang awal dalam melihat masalah dalam penelitian ini. Atas dasar ini pula akan terlihat bahwa persoalan di kawasan SM Bentayan yang melibatkan masyarakat dan negara (BKSDA), adalah sebuah persoalan ketimpangan struktur yang dialami masyarakat. Hal ini akan dielaborasi lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Hanya saja, dalam konteks ini, persoalan struktur adalah masalah mendasar yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan lain, termasuk terjadinya penguasaan masyarakat di kawasan SM Bentayan.

Ketimpangan struktur menjadi penyebab bagi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru dianggap melawan struktur yang ada. Dalam praktiknya, ini berbentuk tindakan yang melawan aturan yang ada. Kendati sudah mengetahui adanya pelarangan dan pembatasan, namun masyarakat tetap saja melakukannya.

Gagasan struktur dari Marxis dan kemudian berlanjut pada kaum Neo Marxis, bisa diturunkan lebih lanjut pada pendapat dari Jurgen Habermas yang merupakan pemikir dari kelompok Mazhab Frankfurt atau kerap disebut sebagai kalangan Mazhab Kritis. Bagi Habermas, kepentingan (*interesse*) merupakan orientasi dasar yang berakar pada kemampuan manusia dan menjadi sarana manusia mengembangkan dirinya. Untuk itu, Habermas mengungkapkan bahwa kepentingan selalu terkait erat dengan pengetahuan, media sosial, dan ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu yang di dalamnya terkandung pengetahuan tentang suatu realitas harus bisa direalisasikan via media tertentu demi mencapai tujuan yang merupakan kepentingan pihak yang menggunakan ilmu terkait.

Habermas (1981;43) juga menegaskan bahwa perkembangan masyarakat selalu berada dalam hubungan dialektis antara proses kognitif-teknis dan moral-komunikatif. Masyarakat yang berkembang hanya dengan mendasarkan diri pada dimensi kognitif-teknis tidak akan mengubah sistem yang melingkupi *dunia-hidup* manusia. Sebab, dimensi kognitif-teknis hanya akan memperkuat kerangka institusional yang telah ada.

Dimensi kognitif-teknis hanya akan memperkuat kedudukan orang kuat dan semakin melemahkan posisi orang-orang pinggiran. Baru apabila masyarakat berusaha mengembangkan dimensi komunikasi secara jelas, benar, jujur dan tepat dalam



bingkai cakupan pandangan moral, misalnya hubungan kerja disadari sebagai diskriminatif, jadi secara moral tidak benar, tatanan institusional akan diubah; dan dengan demikian potensi baru yang tercakup dalam berbagai keterampilan teknologi baru yang sudah dipelajari dapat menjadi efektif dan menghasilkan perubahan dalam cara suatu masyarakat memproduksi.

Gagasan dari Habermas di atas dan didasari pada pandangan konflik struktural dari Marxian, bisa diterjemahkan pada realitas di SM Bentayan. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana penguasaan lahan dan kawasan dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat. Bagaimana sebuah realitas ketimpangan struktur yang akhirnya menjadi penyebab masyarakat bermigrasi dan memasuki kawasan yang sejatinya terlarang, sehingga kemudian membentuk sebuah tatanan sosial yang baru.

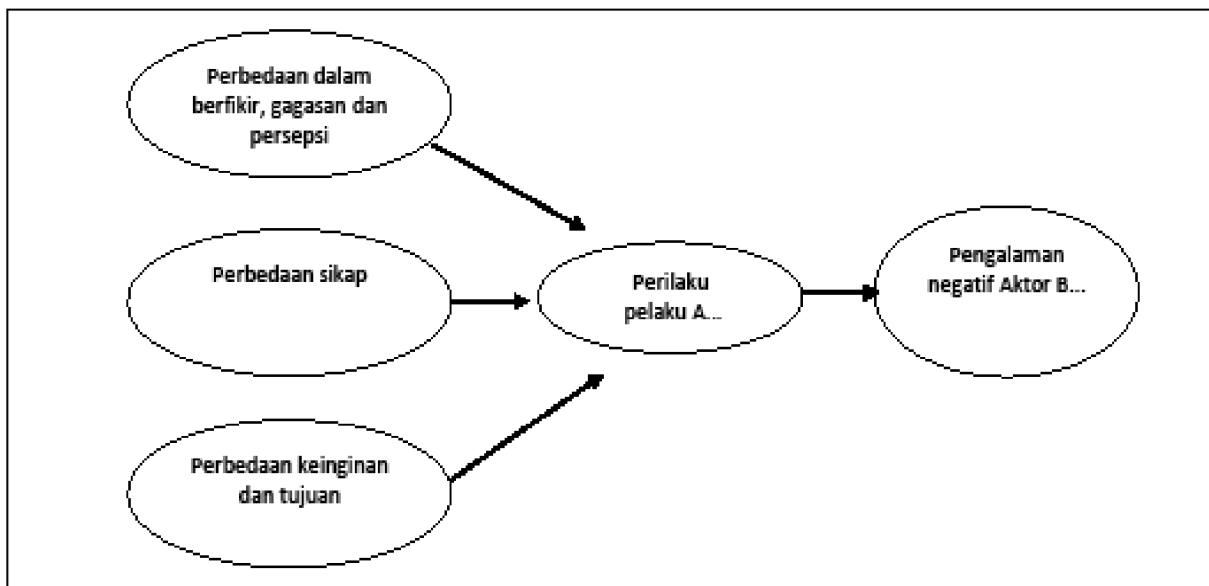
Kajian dari sosiologi kritis menjadi lebih menarik karena akan melihat aspek persoalan dalam konteks yang berbeda. Pandangan dari Marxis dan Habermas, memiliki korelasi dengan berbagai realitas yang kemudian bisa dilihat di kawasan SM Bentayan. Dikarenakan penelitian ini ingin mengkaji secara lebih dalam mengenai pola penguasaan lahan, maka struktur dalam masyarakat serta alasan-alasan kedatangannya menjadi sangat penting. Disinilah sudut pandang kaum Neo Marxis menjadi pilihan, dengan mengasumsikan bahwa semua persoalan terjadi karena masalah struktur dan ketimpangan yang

dirasakan.

Hasil penelitian dari Y Yasmi, Lisa Kelley, dan Thomas Enters (2011) dengan judul "Forest Conflict in Asia and the Role of Collective Action in Its Management," bisa dijadikan rujukan awal bahwa terjadinya konflik di beberapa kawasan di Asia selalu melibatkan masyarakat lokal, kemudian perusahaan yang melakukan investasi, dan pemerintah. Unsur masyarakat selalu ada karena konflik selalu melibatkan mereka. Dijelaskan oleh Yasmi dkk (2011;14) bahwa negara memiliki kekuatan kuat karena selalu didukung oleh aturan hukum formal dan konstitusi.

Negara memiliki hak monopoli ketika sudah didukung oleh aturan-aturan hukum yang dibuat. Hal ini kemudian akan berhadapan dengan realitas masyarakat yang mendiami suatu kawasan. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, pemerintah dengan di *back up* oleh kekuatan militer melakukan perlindungan terhadap perusahaan perkayuan. Hal ini kemudian berhadapan dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Konflik menjadi rumit karena berhadapan dengan tiga aspek ini (masyarakat, pemerintah, dan perusahaan).

Dalam hal ini, terdapat hak-hak kekayaan masyarakat, baik yang sudah menempatnya dari awal ataupun yang datang kemudian. Konflik bisa semakin kuat, disebabkan oleh ketimpangan struktur yang dirasakan masyarakat, sebagaimana Marx telah menyebutkannya. Secara cepat maupun secara lambat, hal ini akan berimbas



Sumber: Glasl, F. 1999. *Confronting conflict: A first-aid kit for handling conflict*. Gloucestershire: Hawthorne Press.



pada masyarakat dan bisa menyebabkan konflik semakin meluas ke pihak lain, atau melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya tidak masuk. Model dari Glasl (1999) bisa menjelaskan hal ini, yaitu:

Model di atas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari perbedaan pola pikir, sudut pandang, persepsi, emosi, dan kepentingan para pihak. Hal ini kemudian berimbas pada perilaku yang ditunjukkan oleh para aktor yang terlibat. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perilaku merusak dari aktor lain. Ada semacam efek berantai dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain.

Kedatangan masyarakat ke kawasan terlarang (Suaka Margasatwa) menjadi cikal bakal terjadinya konflik, yang kemudian berbentuk pada penguasaan mereka terhadap kawasan yang ada. Hal ini bisa diuraikan sebagai bentuk ketimpangan struktur yang terlihat dari perbedaan sudut pandang dan latar belakang dalam melihat kawasan SM Bentayan.

### **Proses Kedatangan Penduduk ke Kawasan SM Bentayan**

Penduduk yang ada di dalam kawasan SM Bentayan ini berasal dari berbagai daerah atau kelompok etnis seperti Jawa, Sunda, Bali, Batak dan beberapa kelompok etnis yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan seperti kelompok etnis Melayu Musi, Melayu Banyuasin, Ogan, Komering, dan etnis lokal lainnya. Kedatangan kelompok etnis lokal ke kawasan ini berawal dari pekerjaannya sebagai pencari kayu, sementara kedatangan kelompok etnis luar bermula sebagai pekerja di beberapa perusahaan yang ada di wilayah sekitarnya seperti perusahaan migas, HTI (Hutan Tanaman Industri), dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kedatangan penduduk kelompok etnis luar ke wilayah ini dimulai akhir tahun 1980 an sampai tahun 1990 an karena pada periode waktu itu mulai ada perusahaan yang melakukan pembangunan, sudah barang tentu membutuhkan banyak tenaga kerja. Akan tetapi, tenaga kerja lokal sulit diperoleh karena tenaga kerja dari kelompok etnis lokal lebih tertarik bekerja sebagai buruh di perusahaan kayu yang ada di wilayah ini karena pendapatannya jauh lebih besar dari pada pendapatan buruh di perusahaan perkebunan yang ada pada waktu itu. Akibatnya, beberapa perusahaan yang ada

di wilayah ini mendatangkan tenaga kerja dari luar terutama kelompok etnis Jawa baik yang berasal wilayah pulau Jawa maupun yang berasal dari wilayah Provinsi Lampung dan dari desa-desa transmigrasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Di akhir kontrak kerjanya di perusahaan yang ada, tenaga kerja pendatang ini tidak semuanya kembali ke daerah asalnya. Banyak dari tenaga kerja ini yang membuka kebun karet maupun kelapa sawit sebagai sumber mata pencahariannya. Kondisi ini menjadi salah satu sebab terjadinya jual beli lahan antara penduduk kelompok etnis pendatang dengan penduduk kelompok etnis lokal. Keberhasilan penduduk kelompok etnis pendatang dalam membangun perkebunan karet dan kelapa sawit di wilayah ini ternyata menjadi daya tarik penduduk luar masuk ke wilayah ini.

Hasil penelitian dari Schale Up (2011) menunjukkan bahwa kedatangan warga ke kawasan ini berlangsung secara bergelombang, mulai dari 2003, 2004, hingga sekarang. Warga yang semula hanya beberapa kepala keluarga (sekitar 50 KK), secara perlahan terus bertambah. Saat ini, warga sudah bervariasi, dalam arti kata, ada yang memang datang dari awal dan membentuk pemukiman hingga saat ini, dan ada juga yang datang hanya untuk berkebun. Kelompok kedua ini umumnya warga dari desa di sekitarnya. Mereka tinggal di desa-desa sebelah, namun membuka kebun di kawasan SM Bentayan. Jumlahnya tidak pasti, namun diperkirakan antara 20-30 KK.

Di akhir tahun 1990 sampai awal tahun 2000, kayu di hutan sudah mulai habis dirambah dan terbakar, sehingga banyak tenaga kerja dari kelompok etnis lokal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka mulai membuka kebun seperti penduduk kelompok etnis Ogan, yang berasal dari wilayah Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir, yang sekarang menjadi Desa Sukadamai. Kelompok etnis lokal lainnya, yaitu kelompok etnis Melayu Musi dan kelompok etnis Melayu Banyuasin yang ada di Desa Bentayan, yaitu di Dusun Simpang Sekijing dan Bulian. Kondisi kebun karet mereka umumnya kurang terpelihara dengan baik, sehingga produksinya tidak optimal. Pemukiman mereka berada di pinggiran atau berbatasan dengan kawasan SM Bentayan, akan tetapi kebun karet mereka umumnya di dalam kawasan.

Hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan fenomena bahwa masyarakat memasuki kawasan ini terdiri atas beberapa



**Tabel 1**  
**Proses Kedatangan Warga ke SM Bentayan**

Tahun Kedatangan	Cara Datang	Bermukim/Tidak	Jumlah
1981-1991	Datang sendiri untuk berkebun dan cari kayu	Tidak	Tidak pasti
2003	Datang sendiri untuk berkebun dan bermukim	Ya	5 KK
2003-2004	Datang dan dikoordinir	Ya	Sekitar 150 KK*)
2007 - sekarang	Membeli lahan dan membuat pemukiman	Ya	Sekitar 150 KK*)
2007 - sekarang	Membeli lahan berkebun	Tidak	Sekitar 15 KK*)

*Sumber : Hasil wawancara lapangan, 2014.*

\*) jumlah warga yang datang tidak bisa dipastikan, tetapi yang jelas jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Saat ini jumlah warga sudah mencapai 850 KK.

cara. Selengkapnya bisa dilihat dari Tabel 1. Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa cara kedatangan warga ke lokasi SM Bentayan cukup bervariasi. Hanya saja mereka selalu datang sendiri, tanpa ada pengkoordinasian. Koordinir yang dilakukan baru terjadi setelah mereka berada di lokasi dan kemudian menempati lahan-lahan yang disediakan. Di sinilah, salah seorang tokoh warga setempat sangat berperan penting, yaitu Muhammad Nur. Dialah yang melakukan proses koordinasi warga di tahap awal, menentukan lokasi, membagi kaplingan, dan mengatur pemukiman warga. Muhammad Nur bertindak bersama 5 warga yang merupakan pendatang awal ke lokasi ini yaitu Sutibi, Bustomi, Rajidin, dan Sarjono.

Penjelasan di atas bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa kedatangan warga ke lokasi SM Bentayan, dilakukan dengan cara datang sendiri-sendiri dan membuka areal baru secara berkelompok. Hal ini terlihat berbeda dengan hasil riset dari berbagai pihak lain, yang cenderung menempatkan bahwa warga adalah komunitas asli yang sudah ada sejak dulunya. Intervensi kebijakan pemerintahlah yang kemudian membuat semuanya berubah menjadi konflik.

Hasil penelitian dari Yasmi dkk (2011, 2007, 2003), Gritten (2007) menunjukkan hal tersebut, bahwa komunitas yang ada adalah komunitas asli, kelompok masyarakat adat, yang mendiami kawasan hutan dengan segala tradisi dan kekayaan yang dimiliki. Di sisi lain, terdapat pula komunitas yang mendiami kawasan, dengan alasan utama adalah faktor ekonomi, bukan persoalan adat dan tradisi. Mereka mendiami sebuah wilayah adalah karena faktor ketidakmampuan mengakses aset ekonomi di wilayah lain. Persoalan ketimpangan struktur menjadi alasan utama.

Gagasan dalam pandangan Marxis mempertegas pandangan bahwa masalah

ketimpangan yang terjadi, terutama antara kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme ekonomi dengan kelompok yang dianggap menguasai aset ekonomi (pemerintah dan perusahaan), tampak jelas di kawasan SM Bentayan. Salah satu pandangan dasar masyarakat adalah mengatakan bahwa mereka mendiami kawasan SM Bentayan dikarenakan tidak ada pilihan lain. Sebuah keterpaksaan secara ekonomi yang menyebabkan mereka harus masuk ke daerah yang dinyatakan terlarang.

### **Faktor Penyebab Masyarakat Memasuki Kawasan SM Bentayan**

Banyak hal yang bisa menyebabkan masyarakat memasuki sebuah kawasan yang dianggap dilarang secara hukum. Analisis berdasarkan perspektif Sosiologi Kritis, terutama melihat dari sudut pandang Marxis maupun kalangan Neo-Marxis, akan melihat ini sebagai efek dari persoalan ketimpangan struktur yang dialami sebuah komunitas (lihat Marx and Engels, 1962, Roderick, 1986).

Dalam pandangan Marx (Hardiman, 2008;55) dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat adalah orang yang bekerja dengan alat kerja mengolah alam. Semuanya merupakan kekuatan produksi masyarakat, sedangkan hubungan antara pekerja dengan proses produksi merupakan hubungan produksi. Hubungan produksi sendiri adalah hubungan kekuasaan antara pemilik modal, dan kaum buruh. Pengetahuan atau rasio masyarakat ditentukan oleh faktor ekonomis, dan kesadaran baru yang timbul hanyalah akibat langsung dari penataan baru atas proses produksi sosial (lihat juga Marx, 1962; 363).

Pandangan di atas tampak juga pada konteks wilayah SM Bentayan, walaupun tidak identik sebagai pertentangan antarkelas pemilik modal dan kaum buruh. Realitas yang



terjadi adalah pertentangan antara pengatur regulasi (pemerintah) dengan masyarakat, keduanya kemudian bersintesis menjadi hubungan antara pemegang kekuasaan dan yang dikuasai. Oleh karena itu, penjelasan berikut ini bisa menggambarkan bagaimana realitas penyebab kedatangan warga ke lokasi SM Bentayan.

*Pertama*, pertumbuhan penduduk di desa-desa sekitar kawasan SM Bentayan, khususnya di Kecamatan Tungkal Jaya, cukup pesat rata-rata 2,2 persen (BPS. Kab. Muba. 2013). Pertambahan jumlah penduduk ini dominan akibat kelahiran, meskipun penduduk pendatang baru ke wilayah ini juga ada.

Dengan pertambahan jumlah penduduk yang relatif pesat ini, sudah barang tentu membutuhkan areal lahan baik sebagai sumber mata pencaharian maupun pemukiman. Sementara, lahan yang ada di sekitar pemukiman mereka sudah menjadi areal perkebunan kelapa sawit PT. SMB, PT. Hindoli, PT. Lonsum, PT. PN VII, PT. Pinang Wit Mas, beberapa perusahaan HTI, Tambang Batubara dan Migas, PT Conoco Philip. Keadaan ini menjadi salah satu pendorong masuknya penduduk yang ada di sekitar ke kawasan SM Bentayan, meskipun harus dengan cara mengeluarkan uang kepada pihak preman yang ada di wilayah ini.

Terjadinya persoalan keterpinggiran masyarakat terhadap akses ekonomi memaksa mereka untuk berhadapan dengan pemerintah. Masyarakat memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat kawasan SM Bentayan (lihat Glasl, 1999), yang kemudian memicu terjadinya persoalan lain yang lebih besar. Kemegahan dan kemampuan perusahaan-perusahaan besar untuk beroperasi dan berusaha di dekat tempat mereka tinggal, sementara mereka tidak memiliki kemampuan secara fisik, maka memasuki kawasan yang diatur oleh pemerintah, adalah pilihan terakhir.

*Kedua*, kawasan SM Bentayan berada di antara Sungai Tungkal di sebelah timur dan Sungai Lalan di sebelah barat dengan kondisinya yang semak belukar akibat penjarahan masyarakat dan kebakaran tahun 1997. Wilayah ini mudah diakses oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu di dalam kawasan ini juga sudah ada 12 titik bor pertambangan minyak dan gas oleh PT. ConocoPhilip. Akibatnya jalan-jalan ke lokasi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk masuk dan menggarap kawasan menjadi kebun karet dan kelapa sawit.

*Ketiga*, peristiwa reformasi dan otonomi daerah ternyata telah memberikan dorongan kepada masyarakat memasuki kawasan SM Bentayan, sehingga ketika lahan-lahan mereka terkena pembebasan oleh beberapa perusahaan perkebunan, kelapa sawit khususnya, mereka masuk dan menggarap kawasan sebagai kebun karet dan kelapa sawit penggantinya. Dengan kebutuhan lahan masyarakat yang besar, maka masuk wilayah kawasan SM Bentayan adalah pilihan termudah. Akibatnya penduduk yang masuk ke dalam kawasan bertambah banyak, sehingga membentuk perkampungan (dusun).

Realitas di daerah SM Bentayan menunjukkan sekali bahwa kawasan ini sudah dikepung oleh banyak perusahaan besar, baik lokal maupun asing. Salah satu yang paling menonjol adalah aktivitas PT SMB (Sentosa Mulia Bahagia) yang beroperasi dengan membuka perkebunan kelapa sawit. Kawasan yang dikuasai oleh PT SMB ini memasuki kawasan pemukiman penduduk di Desa Simpang Tungkal dan perkebunan karet warga. Dikarenakan lemahnya posisi masyarakat di mata hukum positif, maka mereka tidak bisa berbuat banyak. Masyarakat yang tergusur oleh aktivitas PT SMB inilah yang kemudian banyak datang belakangan dan masuk ke SM Bentayan.

*Keempat*, lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari para petugas BKSDA untuk mengamankan kawasan SM Bentayan menjadi salah satu faktor penyebab masuknya penduduk ke dalam kawasan ini. Kelemahan pengawasan kawasan SM Bentayan, antara lain, jumlah petugas sangat kurang. Berdasarkan data di BKSDA Provinsi Sumatera Selatan (2014), jumlah petugas yang ada di kawasan SM Bentayan semuanya ada 4 orang, dengan luas lebih kurang 20.020 hektar, sehingga setiap orang petugas memiliki tanggung jawab mengawasi 5.004 hektar. Kondisi kawasan SM Bentayan yang lokasinya sudah terbuka karena jalan akses di sekitar dan di dalam kawasan sudah ada, sehingga para petugas kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, apalagi semua petugas bertempat tinggal di Palembang dan kantor BKSDA yang ada di kawasan ini lebih banyak dalam keadaan kosong.

*Kelima*, penetapan daerah kawasan SM Bentayan sebenarnya adalah keputusan pemerintah sebagai sebuah institusi resmi. Pemerintah di sini dalam pengertian yang luas, yaitu meliputi semua departemen di semua tingkat pemerintahan. Pada daerah



kawasan SM Bentayan, koordinasi antara aparat pemerintah ini sangat lemah dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti bangunan sekolah negeri secara permanen, penyediaan jaringan listrik, dan pengerasan jalan desa. Pihak BKSDA kerap kali tidak tahu menahu dengan adanya pembangunan ini, dan baru bertindak setelah bangunan selesai.

Keenam, keterlibatan pihak masyarakat dalam pengawasan dan penjagaan kawasan SM Bentayan sangat kurang. Keadaan ini, antara lain karena hubungan antara petugas BKSDA dengan tokoh dan anggota masyarakat tidak harmonis, sehingga proses pembelajaran di kalangan masyarakat tidak berjalan. Selain itu, pihak pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap penduduk yang masuk dan menggarap kawasan SM Bentayan dan kelompok masyarakat penjaga hutan yang telah dibentuk oleh BKSDA tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Mereka tidak bisa mengatasi tekanan dari orang-orang yang selama ini melakukan penjualan lahan di dalam kawasan SM Bentayan.

Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyebab utama kedatangan warga adalah untuk mencari peluang baru dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Keterpinggiran dan semakin hilangnya potensi ekonomi di daerah asal, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam bersaing dengan pemodal besar, menjadi alasan mendasar untuk masuk ke kawasan SM Bentayan. Terbukti sekali di sini bagaimana pandangan Glasl (1999), Marx (1962), dan Habermas (1971), menemukan fakta-faktanya di kawasan SM Bentayan. Lemahnya posisi tawar masyarakat menjadi alasan mendasar terjadinya semua persoalan ini.

Penguasaan lahan oleh warga tentunya tidak bisa dilepaskan dengan faktor motivasi ini. Banyak kajian sebenarnya sudah dilakukan dan cenderung menunjukkan bahwa penguasaan lahan ini berkaitan dengan status masyarakat setempat, seperti komunitas adat.

Tri Martial (2011) dalam Jurnal Mimbar volume XXVII menyatakan, bahwa realitas masyarakat adat memang menjadi faktor utama penguasaan lahan. Artinya, sisi historis dan asal usul masyarakat akan ikut menentukan. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat di kawasan SM Bentayan, di mana posisi mereka tidak

memiliki sejarah masyarakat adat, mereka hanyalah kaum pendatang yang memasuki kawasan dikarenakan faktor ekonomi belaka. Kendatipun demikian, konflik dan masalah selalu muncul, bahkan cenderung menguat seiring dengan semakin lamanya masyarakat menetap.

### **Pola Penguasaan Kawasan SM Bentayan**

Awal masyarakat memasuki kawasan SM Bentayan, adalah keinginan untuk membuka kebun kecil-kecilan, disebabkan oleh berkurangnya lahan di tempat asal. Aktivitas warga ini tidak mendapat teguran ataupun tindakan dari pihak berwenang, baik itu dari pemerintah desa, ataupun dari para petugas BKSDA sendiri. Pemerintah desa cenderung tutup mata, walaupun tahu bahwa itu adalah hutan kawasan. BKSDA juga tidak mengambil tindakan dari awal. Kemudian mereka berkelompok menentukan penentuan lokasi untuk pemukiman, sarana dan prasarana sosial mereka. Pola penguasaan lahan dengan cara ini luasannya sangat terbatas, selain jumlah penduduknya yang tidak banyak juga kemampuan penggarapannya juga hanya mengandalkan tenaga. Dengan terbentuknya dan semakin kuatnya peran kelompok masyarakat yang ada di dalam kawasan SM Bentayan, mulai ada perluasan dengan melakukan pengaplingan dengan harga atau imbalan tertentu karena penduduk membutuhkan lahan terus berdatangan. Setelah merasa tidak ada halangan, maka datanglah rombongan warga lain dan kemudian bertambah banyak. Keadaan ini berlangsung hanya dalam beberapa tahun saja, sehingga membentuk perkampungan Belido 1, 2, dan 3.

Kelompok pendatang kedua ini lebih berkembang karena pada umumnya datang dengan modal usaha yang relatif baik ketimbang kelompok pendatang pertama. Selain itu, pada awalnya kelompok masyarakat ini berasal dari luar wilayah di sekitar kawasan, maka sekarang justru warga-warga penduduk asli yang selama ini tidak mau menyentuh hutan kawasan, juga ikut-ikutan masuk dan menggarap lahan kawasan menjadi kebun karet dan kelapa sawit.

Dalam sebuah wawancara dengan warga di Simpang Sikijing, disebutkan bahwa "Dulu kami tidak ada yang berani masuk hutan kawasan ini, karena dijaga oleh Pesirah. Setiap ada yang masuk, akan ditegur dan dilarang. Namun sekarang, kami lihat banyak warga luar yang masuk dan membuka kebun di dalam. Kalau orang luar saja bisa berkebun



di situ, kenapa kami tidak bisa? Ya, akhirnya kami juga ikut-ikutan.”

Pola penguasaan terbaru dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu atau premanisme, dengan cara memasukkan peralatan untuk membuka jalan akses ke lokasi yang sudah dikaplingkan. Penduduk yang datang juga pada umumnya dari wilayah-wilayah transmigrasi, baik yang ada di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumatera Selatan, dengan tujuan pengembangan usahanya. Mereka sanggup membeli 8-9 juta rupiah per kaplingnya atau 2 hektar. Hal ini tampak pada daerah Bor 6, Bor 8 dan Bor 10 masyarakat dari luar terus berdatangan membangun rumah dan berkebun serta membangun jalan akses ke lokasi ini dengan menggunakan alat berat. Penamaan daerah ini didasarkan pada aktivitas penambangan migas oleh perusahaan yang menyebutkan daerah pengeboran. Sekaligus juga menunjukkan bahwa daerah tersebut sebenarnya belum memiliki nama dan belum memiliki penghuni sebelumnya. Kedatangan warga baru yang kemudian diberikan nama Bor 6, Bor 8 dan Bor 10 sekadar untuk penanda lokasi yang ditempati masyarakat.

Bisa dikatakan bahwa terdapat tiga kelompok utama masyarakat yang mendiami kawasan SM Bentayan. Tiga kelompok ini didasarkan pada awal kedatangan dan lokasi awal sebelum mereka masuk ke daerah ini. Gambaran ringkas mengenai tiga kelompok ini bisa dilihat dari tabel 2.

Pada Tabel 2 adalah kesimpulan penulis terhadap kelompok masyarakat yang beraktivitas di kawasan SM Bentayan. Dari tiga kelompok di atas maka yang paling luas dan militan dalam melakukan penguasaan terhadap kawasan SM Bentayan adalah kelompok pendatang awal. Merekalah yang secara mati-matian mempertahankan posisinya di kawasan SM Bentayan, bahkan sampai terjadinya konflik dengan pihak BKSDA dan beberapa anggota masyarakat sempat masuk penjara (Schale up, 2011). Mereka jugalah yang membuka areal ini pertama kali dan kemudian diikuti oleh kelompok warga lainnya.

**Tabel 2**  
**Tipe Kelompok Masyarakat yang Mendiami Kawasan SM Bentayan**

Kelompok	Daerah Asal	Alasan Datang
Pendatang awal	Di luar daerah sekitar	Berkebun dan Menetap
Pembeli lahan	Daerah sekitar	Berkebun
Ikut-ikutan	Desa sekitar	Berkebun dan ikut-ikutan

Sumber : Hasil Analisa Data Lapangan, 2014

Sementara, untuk kelompok kedua dan ketiga, bisa dikatakan adalah kelompok yang datang karena melihat keberhasilan kelompok pertama. Daya tarik dari apa yang sudah dilakukan oleh kelompok pertama, membuat mereka juga ikut-ikutan masuk. Dalam hal ini, militansinya tidak terlalu kuat. Cara penguasaan mereka terhadap lahan yang ada

**Bagan 2**  
**Pola Penguasaan Lahan oleh Warga di Kawasan SM Bentayan**



Sumber: Analisa Penulis Berdasarkan Data di Lapangan



umumnya juga melalui transaksi ekonomi, yaitu jual beli lahan dengan masyarakat setempat. Secara ringkas, pola penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan SM Bentayan bisa dilihat dari Bagan 2.

Pada Bagan 2 tampak bahwa pola penguasaan lahan di kawasan SM Bentayan dilakukan oleh warga sudah cukup sistematis. Awalnya memang hanya kedatangan beberapa orang saja dengan tujuan untuk membuka kebun kecil-kecilan. Lambat laun hal ini disusun menjadi lebih sistematis, terutama disebabkan oleh banyaknya warga yang datang dan seringkali terjadi konflik dengan pihak BKSDA. Rasa senasib dan sepenanggungan yang dialami warga, kemudian membuat mereka mengorganisasi diri dan akhirnya melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk menguasai kawasan SM Bentayan, terutama wilayah yang sudah mereka diami dan usahakan selama ini.

Penguasaan di kawasan SM Bentayan kentara sekali adalah keinginan untuk menguasai lahan demi kepentingan ekonomi. Motivasi untuk melakukan konservasi sangat minim sekali. Setidaknya, ini terlihat dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan. Pengamatan menunjukkan perluasan lahan oleh warga terus terjadi tanpa ada upaya untuk membatasi dan menekan laju kerusakan hutan. Hal ini berkaitan erat dengan tidak adanya upaya konservasi yang serius dari aparat terkait, terutama oleh BKSDA Sumatera Selatan.

Sebuah riset dari Ardik Winata dan Ernik Yuliana (2012) yang dimuat dalam Jurnal Mimbar Volume XXVIII menyebutkan bahwa pada daerah yang sudah melakukan Program Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), ada kecenderungan bahwa semakin lama umur petani hutan tinggal di daerah tersebut, maka semakin kuat pula kecenderungannya untuk ikut dalam program PHBM. PHBM sendiri adalah program yang dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelestarian kawasan hutan. Pada wilayah SM Bentayan, justru program seperti ini tidak pernah dilakukan. Alasan utama adalah karena wilayah tersebut adalah wilayah yang memang dilarang untuk ditempati warga.

Program perhutanan yang memang melibatkan warga memang diarahkan untuk mengadopsi keberadaan warga di lokasi yang ada. Hanya saja, di kawasan SM Bentayan hal ini tidak mungkin dilakukan dan penguasaan lahan oleh warga tetap terjadi. Polanya lebih cenderung dikatakan sebagai penguasaan

dengan cara ilegal atau tanpa izin.

### Potensi Konflik yang Akan Terjadi

Masyarakat yang berada di dalam kawasan SM. Bentayan dapat dikelompokkan, paling tidak, ke dalam tiga kelompok (Tabel 2), yaitu; kelompok masyarakat penggarap dan bermukim di dalam kawasan atau pendatang awal, kelompok masyarakat pembeli lahan yang hanya menggarap lahan saja tapi bermukim di luar kawasan, dan kelompok ikut-ikutan di mana ada yang bermukim di kawasan dan ada juga yang di luar. Khusus kelompok kedua dan ketiga, beraneka ragam latar belakang pekerjaan dan statusnya, sehingga luas garapannya pun relatif luas karena motifnya lebih pada pengembangan investasi. Sementara, kelompok pertama pada umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Di luar kelompok masyarakat di atas, terdapat pula beberapa kelompok yang memiliki pengaruh pula pada kawasan SM Bentayan. Mereka bukan dalam konteks ingin menguasai atau membuka lahan, namun berperan pada eksistensi masyarakat di kawasan ini. Kelompok ini adalah pemerintah daerah (mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati), sindikat/preman yang melakukan proses rekrutmen warga lain agar masuk ke kawasan, serta beberapa politisi lokal yang kerap melakukan aktivitas politik untuk mendulang suara dari masyarakat.

Keberadaan bermacam kelompok masyarakat dengan tujuan yang berbeda ini, berpotensi melahirkan konflik ketika pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang bertugas mengawasi dan mengelola kawasan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada berhadapan dengan kelompok-kelompok tersebut. Fisher (2001) menyatakan, konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap hidup dan permasalahannya. Pandangan individu atau kelompok dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan, pengetahuan, pengalaman, dan tingkat kemampuan yang dimilikinya, sehingga perbedaan ini akan memengaruhi dalam menghadapi permasalahan hidupnya.

Konflik secara terbuka (*manifest*) pernah terjadi antara tahun 2003-2006, ketika pihak BKSDA yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menangkap dan menahan 4 orang yang dianggap tokoh masyarakat yang berada di Dusun Belido 1 dan Belido 2 (Schele Up, 2011). Para petugas ini juga



melakukan perusakan kebun dan pemukiman masyarakat yang ada di dalam kawasan. Hal ini mendapat perlawanan dari masyarakat yang diadvokasi oleh pihak Walhi Sumsel dan LBH Palembang. Desakan dari warga kemudian bisa membebaskan yang ditahan, hingga kemudian dilakukan proses mediasi. San Afri Awang (2011) mengatakan, konflik pengelolaan sumber daya alam hutan merupakan hubungan ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber daya tersebut, baik dalam hal pengetahuan, peraturan, kepentingan dan pemanfaatan, sehingga sering menimbulkan kerusakan.

Sampai saat ini, sejak tahun 2007, konflik terbuka memang tidak lagi terjadi. Akan tetapi, potensi terhadap terjadinya konflik lanjutan sangat dimungkinkan. Potensi ini malah sudah berkembang, tidak lagi antara masyarakat setempat dengan BKSDA Sumsel (konflik vertikal), namun juga antara sesama masyarakat (konflik horizontal).

Secara vertikal, ini terlihat dari indikasi makin meluasnya pembukaan lahan yang dilakukan warga, baik warga yang pertama datang ataupun warga lain yang datang kemudian. Sementara, pihak BKSDA telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan dengan menyebut warga sebagai perambah hutan. Tanam tumbuh yang ditanam warga juga semakin banyak dan beberapa kebun sudah menghasilkan. Warga sendiri, secara administratif pemerintahan sudah diakui sebagai bagian dari Desa Sumpang Tungkal (khususnya Dusun Belido I dan II). Mereka sudah memiliki legalitas kartu tanda penduduk (KTP), karena itu warga juga merasa sudah semakin memiliki kekuatan hukum berada di kawasan SM Bentayan.

Keberadaan beberapa oknum warga yang melakukan pengkoordinasian kedatangan warga ke SM Bentayan ikut menambah semakin banyaknya warga yang datang ke kawasan ini. Motivasinya sudah berbeda, karena mengarah pada penumpukan aset-aset lahan sebagai aset ekonomi. Proses akumulasi modal sudah terjadi pada wilayah ini. Sementara, pihak BKSDA Sumsel belum berbuat banyak, kecuali memberikan surat-surat peringatan. Hanya saja ini berpotensi besar terjadinya konflik, ketika warga semakin luas membuka lahan.

Sementara secara horizontal, konflik memungkinkan pula terjadi karena semakin banyaknya warga yang datang menyebabkan kondisi di kawasan SM Bentayan semakin

kompleks. Persoalan tapal batas lahan warga sudah mulai terjadi singgungan-singgungan. Di beberapa tempat, tampak pula klaim hak kepemilikan secara adat terhadap kawasan yang ada. Hal ini dilakukan oleh kelompok warga yang menganggap sebagai bagian dari pewaris Kesultanan Palembang Darussalam.

Ada klaim tanah warga yang menyebut diri sebagai Tumenggung. Warga lain yang sudah datang dari awal, tidak bisa berbuat banyak karena mereka memang mengakui bukan warga asli di daerah ini. Mereka umumnya berasal dari etnis Jawa. Sementara, yang dari kelompok Kesultanan Palembang Darussalam mengaku sebagai pribumi asli. Mereka awalnya bermukim di desa-desa sekitar kawasan SM Bentayan. Di sinilah potensi konflik horizontal sangat mungkin terjadi, karena para Tumenggung ini melakukan klaim pemilik tanah secara adat, dan warga yang lain harus mengganti rugi kepada para Tumenggung ini. Jumlahnya bervariasi, antara Rp. 25 juta rupiah hingga Rp. 30 juta rupiah per hektarnya.

Persinggungan antara warga ini sudah mulai terlihat. Hal ini diakui oleh salah seorang warga, Zulkifli, yang menyatakan bahwa beberapa kali sempat ada protes dari warga setempat. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena menyadari posisinya yang lemah sebagai kelompok pendatang. Akan tetapi, dengan telah adanya status hukum yang legal terhadap kependudukan mereka, ini memunculkan semacam kekuatan baru.

## Simpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses kedatangan warga ke kawasan SM Bentayan adalah proses yang awalnya tidak terorganisasi. Namun kemudian menjadi sistematis dan berada dalam organisasi pemerintahan resmi. Kehadiran warga ke lokasi SM Bentayan disebabkan, terutama sekali, adalah karena ketidakmampuan secara ekonomi di daerah asal. Tekanan dan kemiskinan akses ekonomi di daerah asal membuat mereka memberanikan diri memasuki daerah yang dilarang oleh aturan yang ada.

Masyarakat mendiami kawasan ini melalui pola-pola yang sistematis dan terorganisasi dengan baik. Ada sebuah pola yang menunjukkan bahwa penguasaan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya menjadi sebuah wilayah pemukiman resmi. Potensi konflik sangat mungkin terjadi karena semakin kompleksnya warga yang mendiami



kawasan ini. Potensi ini bahkan tidak hanya bersifat vertikal, namun sudah mengarah pada konflik horizontal.

Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini, antara lain adalah : *Pertama*, perlu adanya penataan ulang batas kawasan SM Bentayan secara jelas dengan melibatkan anggota masyarakat yang ada di sekitar karena telah mengalami beberapa kali perubahan luasan dari 19.300 hektar (SK Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/4/1981 Tanggal 8 April 1981), Kemudian ada penambahan 18.700 hektar sehingga menjadi 38.000 hektar ( SK Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/1986, Tanggal 29 Desember 1986), dan terakhir menjadi 23.020 hektar ( Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/2001). *Kedua*, perlu adanya perubahan pendekatan dalam penyelesaian konflik kawasan SM Bentayan dari pendekatan hukum (ligitasi) ke pendekatan *educative partisipative* melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan, baik secara individu maupun kelompok, sehingga kapasitas masyarakat juga meningkat. *Ketiga*, dibutuhkan mediator profesional yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik ini. *Keempat*, dalam penyelesaian konflik ini perlu memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat terutama yang selama ini hanya mengadakan dari hasil kebun karet maupun kelapa sawit yang ada di dalam kawasan. *Kelima*, perlu penguatan kemampuan para petugas BKSDA yang ada baik jumlah, kemampuan maupun sarana prasaranya agar bisa menjalankan peran pembinaan pada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Glasl, F. (1999), *Confronting conflict: A first-aid kit for handling conflict*, Gloucestershire: Hawthorne Press
- Gritten, David, (2009), *Facilitating resolution of forest conflicts through understanding the complexity of the relationship between forest industry and environmental groups*, Dissertation, University of Joensuu, Finland
- Goodman, Douglas J. & George Ritzer. (2004), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Habermas, Juergen, (1971), *Toward a Rational Society*, London, Heinemann
- Hardiman, Budi, (2004), *Kritik Ideologi*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius
- Jan R. Thompson, William F. Elmendorf, Maureen H. McDonough, and Lisa L. Burban, (2005), *Participation and Conflict: Lessons Learned From Community Forestry*, *Journal of Forestry*
- Jones, Pip. (2009), *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Martial, Tri, (2011), *Studi Empiris dan Implikasi Penerapan Konsep "Tree Tenure" di Sumatera Barat*, *Jurnal Mimbar*, UNISBA, Volume XXVII, Nomor 2, Desember 2011, hal. 133-142
- Marx Karl and Engels, (1962), *Selected Works*, Moscow, Foreign Language Publishing Houses
- Nasrullah Nazir. (2008), *Teori-teori Sosiologi*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Winata, Ardi dan Ernik Yuliana, (2012), *Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani*, *Jurnal Mimbar*, UNISBA, Volume XXVIII, Nomor 1, Juni 2012, hal. 65-76
- Yurdi Yasmi, Lisa Kelley, Thomas Enters, (2011), *Forest conflict in Asia and the role of collective action in its management*, Jakarta, CAPRI Working Paper
- CJP Colfer, L Yuliani, Y Indriatmoko, V Heri, (2007), *Conflict management approaches under unclear boundaries of the commons: experiences from Danau Sentarum National Park, Indonesia*, *International Forestry*